

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)

M. Aris Dani Canjaya *
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum ***

Kasus penipuan dengan modus investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi. Tindak pidana penipuan saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dengan modus investasi, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi, bagaimana hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi dan bagaimana solusinya

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Ketentuan hukum penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Asahan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Investasi.

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL OFFENDERS FRAUD WITH INVESTMENT MODE (Study at the Asahan Resort Police

M. Aris Dani Canjaya *
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum ***

Cases of fraud using the investment mode continue to recur, even now what is happening is that more and more cases of fraud are occurring under the guise of investment. Fraud crimes are currently widespread and frequently heard about. Economic pressure with increasingly high lifestyles is a major factor in the occurrence of criminal acts. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulations relate to criminal acts of fraud using the investment mode, how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of fraud using the investment mode, what are the obstacles to the police in enforcing the law against perpetrators of criminal acts of fraud using the investment mode and what are the solutions?

The research carried out is normative research, namely research that uses statutory regulations as a basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. The data analysis used is qualitative data.

The legal provisions for investigators in carrying out investigations into criminal acts of fraud using investment mode are in accordance with the provisions of Article 7 of the Criminal Procedure Code based on the Investigation Order, the investigator has the authority in the process of carrying out the investigation. The occurrence of criminal acts of fraud is known because of reports. The suspect and evidence were taken to the Asahan Resort Police. The investigation into criminal acts of fraud using the investment mode is carried out based on the Police Report from the reporter or victim. The investigation into the criminal act begins after the Investigation Order (Sprindik) is issued by the investigator.

Based on the research results, it is understood that the obstacles for investigators in carrying out investigations into criminal acts of fraud using the investment mode are the lack of participation of witnesses in providing information in the investigation process, the human resources of investigators or assistant investigators and witnesses are unable to reveal criminal incidents and the existing evidence is incomplete. The way to overcome the obstacles faced is to search for and prove criminal incidents, increase the human resources of investigators.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, Investment.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*